BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum KPP Pratama Wilayah Kota Bandung

Setelah menjabarkan hal-hal yang melatarbelakangi penelitian, teori-teori yang telah mengukuhkan penelitian, maupun metode penelitian yang digunakan, maka pada bab ini akan dipaparkan mengenai hasil dari penelitian. Hasil penelitian akan dijabarkan berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi dan untuk yang berkaitan dengan variabel penelitian menggunakan kuesioner sebagai data primer.

4.1.1 Sejarah KPP Pratama Wilayah Kota Bandung

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah Kota Bandung merupakan unsur pelaksana Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung lainnya. Umumnya dalam daerah wewenangnya berdasarkan kebijakan teknis yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Sejarah pajak mula-mula berasal dari negara Perancis pada zaman pemerintahan Napoleon Bonaparte, yang pada zamannya beliau terkenal dengan nama “Cope Napoleon”. Pada masa itu negara Belanda dijajah oleh negaraPerancis. Sistem pajak yang diterapkan Perancis kepada Belanda diterapkan pula oleh Belanda kepada Indonesia pada saat Belanda menjajah

Indonesia, yang pada saat itu dikenal dengan "Oor Logs-Overgangs Blasting" (Pajak Penghasilan). Konsep pajak itu kemudian dibuat pada tahun 1942 di Australia disaat Indonesia masih diduduki tentara Jepang.

Maksud dari peralihan mengenai pajak ini merupakan suatu peraturan yang dibuat untuk mempersiapkan bilamana dikemudian hari penjajah Jepang ditarik kembali dari Indonesia. Pemungutan pajak ini oleh pemerintah Belanda dilaksanakan oleh suatu badan yaitu "Deinspetie van Vinancian", yang kemudian diganti dengan nama "Zeinenbu" oleh pemerintah Jepang pada tanggal 15 maret 1942. Lima bulan kemudian, 15 Agustus 1942, nama tersebut diubah menjadi "Kantor Inspeksi Keuangan" dan berkantor di Gedung Concordia (sekarang Gedung Merdeka) Jalan Asia Afrika. Pada tanggal 21 Agustus 1947 bersamaan dengan Agresi Militer Belanda I.

Kantor Inspeksi Keuangan Bandung dipindahkan ke Bandung Selatan di Kabupaten Soreang, bersama-sama dengan Tentara Keamanan Rakyat berevakuasi. Setelah Agresi Militer Belanda II menyerang lagi pada tanggal 19 Desember 1948, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung dipindahkan ke Tasikmalaya. Bersamaan dengan kejadian tersebut, kekuasaan Republik Indonesia terpecah menjadi dua yaitu:

1. Kelompok *Coorporative*, yaitu kelompok anti republik yang tidak ikut evakuasi dan yang bekerja sama dengan NICA.
2. Kelompok *Non-Coorperative* yaitu kelompok anti NICA bersama Republik Indonesia bergerilya didaerah kantong-kantong yang tidak dikuasai oleh Belanda.

Setelah berakhirnya Agresi Militer Belanda II, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung yang berada di Tasikmalaya dibubarkan dan kedudukannya dikembalikan ke Bandung pada tanggal 17 Desember 1947. Kantor Inspeksi Keuangan Bandung pada saat itu diserahterimakan oleh menteri yang pertama, Bapak Safrudin Prawiranegara, dan kemudian menteri negara ini menunjuk Bapak Sahid Koesoemosarminto sebagai kepala Kantor Inspeksi Keuangan Bandung yang pertama, periode 1947-1950, berkantor di km "0" (Groofpostweg), saat ini di Jalan Asia Afrika Nomor 114 Bandung.

Sejak tahun 1968, Kantor Inspeksi Keuangan berganti nama menjadi Kantor Inspeksi Pajak Bandung. Pada tanggal 1 Agustus 1980, Kantor Inspeksi Pajak Bandung dibagi menjadi dua yakni Kantor Inspeksi Pajak Bandung Barat dan Kantor Inspeksi Pajak Bandung Timur. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-48/KMK.01/1988 tanggal 19 Januari 1988 dibentuklah kantor baru yang diberi nama Kantor Inspeksi Bandung Tengah beralamat di Jalan Purnawarman No.21 Bandung dengan Drs. Untung Rivai sebagai kepala kantornya. Sejak berlakunya keputusan menteri keuangan tersebut maka di Bandung dibagi atas tiga kantor inpeksi pajak, yakni :

1. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Timur
2. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Tengah
3. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Barat

Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 23 Maret 1988 Nomor Kep-276/KMK/.01/1988, strukutr organisasi dan tata kerja Direktorat Jendral Pajak di rombak dan berubah nama menjadi Kantor

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 80 Pelayanan Pajak (KPP). Dengan semakin pesatnya perkembangan wilayah, maka dipandang perlu adanya pembagian wilayah kerja agar dapat dimaksimalisasi penerimaan dari sektor pajak. Perkembangan terakhir pada bulan April 2002, kantor pelayanan pajak di wilayah Bandung telah menjadi 7 KPP yakni :

1) KPP Bandung Bojonegara, Jalan Asia Afrika No.114
2) KPP Bandung Karees, Jalan Kiaracondong No.372
3) KPP Bandung Tegallega, Jalan Soekarno Hatta No.2116
4) KPP Bandung Majalaya, Jalan Peta No.7 Lingkar Selatan
5) KPP Bandung Cibeunying, Jalan Purnawarman No.21
6) KPP Bandung Cicadas, Jalan Soekarno Hatta No. 78
7) KPP Bandung Soreang, Jalan Raya Cimareme No. 205

Adapun Visi dan Misi dari Kantor Pelayanan (KPP) Pratama Wilayah Kota Bandung yaitu:

1. Visi

   Menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia, yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat.

2. Misi

   a) Politik, Mendukung Demokrasi Bangsa
   b) Kelembagaan senantiasa memperbarui diri, selaras dengan aspirasi masyarakat dan teknokrasi perpajakan serta administrasi perpajakan mutakhir.

c) Fiskal, menghimpun penerimaan dalam negeri dari sector pajak yang menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi.
d) Ekonomi, mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijaksanaan yang meminimiring distortion.

4.1.2 Struktur Organisasi KPP Pratama Wilayah Kota Bandung

Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Kota Bandung berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.64/KMK.01/1994 Tanggal 20 Maret 2009 adalah sebagai berikut:

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung.
2. Sub. Bagian Umum.
3. Seksi Eksentifikasi Perpajakan
4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI).
5. Seksi Pelayanan.
6. Seksi Penagihan.
7. Seksi Pemeriksaan.
8. Seksi Pengawasan dan konsultasi (Waskon I, II, III, IV).

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran tentang Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung.

4.1.3 *Job Description* KPP Pratama Wilayah Kota Bandung

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang bertugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan dalam daerah wewenagnnya yang meliputi luas daerah tempat kedudukan Wajib Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 82 Pajak dan Pajak pada daerah tertentu berdasarkan kebijaksanaan teknis yang diterapkan oleh Direktorat Jendral Pajak.

Deskripsi jabatan dari stuktur organisasi KPP Pratama Wilayah Kota Bandung adalah sebagai berikut :

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung
    a) Mengawasi jalannya kegiatan operasional pelayanan perpajakan yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL), berdasarkan kebijakan teknis yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak,
    b) Membina karyawan yang ada di wilayah wewenang kekuasaannya,
    c) Menerima laporan kerja dari setiap seksi,
    d) Membuat kegiatan operasional KPP wilayah Bandung.
2. Sub. Bagian Umum, mempunyai tugas sebagai berikut :
    a) Melakukan urusan kepegawaian,
    b) Melakukan urusan keuangan,
    c) Melakukan urusan tata usaha,
    d) Melakukan urusan rumah tangga.
3. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan, mempunyai tugas sebagai berikut :
    a) Melakukan urusan penetapan,

b) Melakukan urusan instensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan,

c) Melakukan urusan penetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi, mempunyai tugas sebagai berikut :

a) Mempunyai tugas melakukan urusan perekaman,

b) Mempunyai tugas melakukan pengolahan data,

c) Mempunyai tugas menganalisis dan penyajian informasi perpajakan.

5. Seksi Pelayanan, mempunyai tugas sebagai berikut :

a) Melakukan urusan penatausahaan pendaftaran,

b) Melakukan urusan pemindahan dan pencabutan identitas wajib pajak,

c) Melakukan urusan penerimaan dan penelitian Surat Pemberitahuan (SPT) dan surat pajak lainnya,

d) Melakukan urusan kearsipan berkas wajib pajak serta penerbitan surat-surat ketetapan pajak.

6. Seksi Penagihan, mempunyai tugas sebagai berikut :

a) Melakukan urusan tata usaha piutang pajak,

b) Melakukan urusan penagihan dan pembuatan usul penghapusan piutang Perpajakan,

c) Melakukan urusan penetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

7. Seksi Pemeriksaan, mempunyai tugas sebagai berikut :

a) Mempunyai tugas menatausahakan dan mengusulkan pemeriksaan rutin,

b) Mempunyai tugas menatausahakan dan mengusulkan penerbitan SP3,

c) Melakukan pemeriksaan lapangan oleh Fungsional Pemeriksa, serta

d) Merekam Nota Hitung.

8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi, mempunyai tugas sebagai berikut :

a) Melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak atas kewajiban Perpajakannya,

b) Melaksanakan penelitian dan analisa kepatuhan Wajib Pajak,

c) Penyusunan nota perhitungan, dan sebagai

d) Alat konsultasi perpajakan bagi Wajib Pajak.

4.1.4 Aktivitas KPP Pratama Wilayah Kota Bandung

Tujuan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung, memberikan pelayanan publik dengan baik kepada Wajib Pajak, dengan memenuhi semua kebutuhan Wajib Pajak untuk dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan Prosedur dan tata kerja organisasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung aktivitas-aktivitas yang dijalankan antara lain:

1. Pelayanan terhadap Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan melalui prosedur yang mudah dan sistematis.
2. Melakukan kegiatan Operasional perpajakan di bidang pengolahan data informasi, tata usaha perpajakan, pelayananan, penagihan, pengawasan dan konsultasi, dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
3. Kegiatan pengawasan dan verifikasi atas pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai dan penerapan sanksi administrasi perpajakan dengan mencari, mengumpulkan, mengolah, data maupun, keterangan lain, dalam

rangka pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan. Juga melakukan kegiatan penata usahaan dan lampirannya termasuk kebenaran penulisan dan perhitungan yang bersifat formal, pemantauan dan penyusunan laporan pembayaran masa PPh, PPN, PBB, BPHTB, dan Pajak tidak langsung lainnya.

4. Mengadakan Kegiatan penyuluhan pajak kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakanya.

4.2 Karakteristik Responden

Data responden yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti dari penelitian ini adalah sebanyak 48 responden pemeriksa pajak mengenai Sistem Informasi, Pemeriksaan Pajak dan kepatuhan wajib pajak yang dilaksanakan pada KPP Pratama Wilayah kota Bandung . Berikut disajikan hasil analisis yang diperoleh berdasarkan jawaban yang diberikan responden atas dasar pernyataan dalam kuesioner.

4.2.1 Profil Responden Berdasarkan Usia

Tabel 4.1
Profil Responden Berdasarkan Usia

Usia	Frekuensi	%
23-33 tahun	15	31,25
34-44 tahun	23	47,92
> 44 tahun	10	20,83
Total	48	100

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa mayoritas responden tertinggi sebanyak 47,92% berusia antara 34-44 tahun, frekuensi terbanyak kedua

merupakan responden yang berusia antara 23-33 tahun sebanyak 31,25% dan paling rendah adalah responden yang berusia > 44 tahun sebanyak 20,83%.

4.2.2 Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.2
Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	%
Laki-laki	30	62,5
Perempuan	18	37,5
Total	48	100

Pada tabel di atas, terlihat bahwa dari 48 pemeriksa pajak di KPP Pratama Wilayah kota Bandung , mayoritas adalah laki-laki sebanyak 62,5% sedangkan sisanya sebanyak 37,5% merupakan perempuan.

4.2.3 Profil Responden Berdasarkan Lama Kerja

Tabel 4.3
Profil Responden Berdasarkan Lama Kerja

Lama Kerja	Frekuensi	%
1-5 tahun	18	37,5
6-10 tahun	22	45,83
10-15 tahun	8	16,67
Total	48	100

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa mayoritas responden sebanyak 45,83% yang lama kerja antara 6-10 tahun, frekuensi terbanyak kedua merupakan responden yang lama kerja antara 1-5 tahun sebanyak 37,5%, dan paling rendah yang lama kerja antara 10-15 tahun sebanyak 16,67%.

4.2.4 Profil Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 4.4
Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

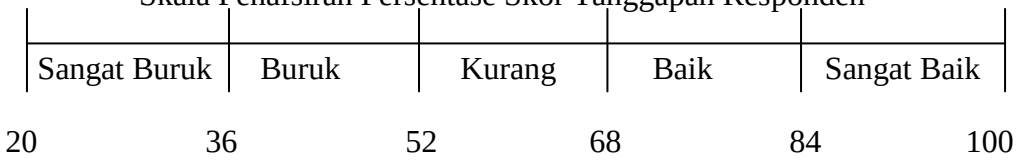
Pendidikan	Frekuensi	%
SMA	5	10,42
D1	3	6,25
D2	7	14,58
D3	8	16,67
S1	20	41,67
S2	5	10,42
Total	48	100

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa mayoritas responden tertinggi sebanyak 41,67% berpendidikan S1, frekuensi terbanyak kedua merupakan responden yang berpendidikan D3 sebanyak 16,67%, frekuensi terbanyak ketiga merupakan responden yang berpendidikan D2 sebanyakl 14,58%, untuk frekuensi terbanyak keempat terdiri dari responden yang berpendidikan SMA dan S2 sebanyak 10,42%. Frekuensi paling rendah merupakan responden yang berpendidikan D1 sebanyak 6,25%.

4.3. Analisis Deskriptif Hasil Tanggapan Responden

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu akan diuraikan gambaran tanggapan responden. Gambaran data tanggapan responden dapat digunakan untuk memperkaya pembahasan, melalui gambaran data tanggapan responden dapat diketahui bagaimana kondisi setiap indikator dan variabel yang sedang diteliti. Agar lebih mudah dalam menginterpretasikan variabel yang sedang diteliti, dilakukan kategorisasi terhadap skor tanggapan responden melalui persentase jumlah skor tanggapan responden yang ditafsirkan sebagai berikut.

Gambar 4.1
Skala Penafsiran Persentase Skor Tanggapan Responden



4.3.1 Analisis Deskriptif Sistem Informasi

Sistem informasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung akan terungkap melalui jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan pada kuesioner. Sistem informasi diukur menggunakan 5 (lima) Dimensi dan dioperasionalisasikan menjadi 12 butir pernyataan. Berikut tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada masing-masing indikator.

1. Hardware

Gambaran mengenai perangkat keras yang digunakan dalam sistem informasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung terangkum pada tabel berikut:

Tabel 4.5
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Perangkat Keras

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
1	Jumlah komputer yang ada di kantor pada bagian pemeriksaan	F	12	27	6	0	3	189	240	78,75
		%	25,0	56,3	12,5	0,0	6,3			
2	Perangkat input dan output data yang ada dikantor pada bagian pemeriksaan	F	1	25	3	18	1	151	240	62,92
		%	2,1	52,1	6,3	37,5	2,1			
3	Keadaan komputer yang ada dikantor pada bagian pemeriksaan	F	0	31	1	13	3	156	240	65,00
		%	0,0	64,6	2,1	27,1	6,3			
	Total Indikator							**496**	**720**	**68,89**

Pada tabel 4.5 dapat dilihat persentase total skor tanggapan responden atas ketiga butir pernyataan pada indikator perangkat keras sebesar 68,89% dan termasuk dalam kategori baik. Artinya perangkat keras yang digunakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung pada umumnya sudah memadai. Selanjutnya bila dilihat dari distribusi skor tanggapan responden, sebagian besar responden sependapat bahwa jumlah komputer yang ada di kantor pada bagian pemeriksaan sudah mencukupi. Namun perangkat input dan output data yang ada dikantor pada bagian pemeriksaan masih kurang memadai, hal ini bisa dilihat dari persentase skor tanggapan responden sebesar 62,92% dan termasuk dalam kategori kurang. Demikian juga dengan keadaan komputer yang ada dikantor bagian pemeriksaan, pada umumnya masih kurang memadai, dimana persentase skor tanggapan responden sebesar 65,0 termasuk dalam kategori kurang.

2. Software

Gambaran mengenai perangkat lunak yang digunakan dalam sistem informasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung terangkum pada tabel berikut:

Tabel 4.6
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Perangkat Lunak

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
4	Program Aplikasi yang dipakai oleh Direktorat Jenderal Pajak	F	3	39	5	1	0	188	240	78,33
		%	6,3	81,3	10,4	2,1	0,0			
5	Sistem operasi yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak	F	1	42	3	1	1	185	240	77,08
		%	2,1	87,5	6,3	2,1	2,1			
	Total Indikator							**373**	**480**	**77,71**

Pada tabel 4.6 dapat dilihat persentase total skor tanggapan responden atas kedua butir pernyataan pada indikator perangkat lunak sebesar 77,71% dan termasuk dalam kategori baik. Artinya perangkat lunak yang digunakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung sudah memadai. Selanjutnya tanggapan responden pada masing-masing butir pernyataan dapat dilihat bahwa pada umumnya responden menilai program Aplikasi yang dipakai oleh Direktorat Jenderal Pajak mudah digunakan (skor 4). Demikian juga dengan sistem operasi yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, menurut sebagian besar responden mudah digunakan (skor 4).

3. Brainware

Gambaran mengenai pengguna sistem informasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung terangkum pada tabel berikut:

Tabel 4.7
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Pengguna

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
6	Pemahaman tentang program aplikasi yang digunakan Direktorat Jenderal Pajak	F	2	31	14	1	0	178	240	74,17
		%	4,2	64,6	29,2	2,1	0,0			
7	Tanggapan tentang program aplikasi yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak	F	13	16	17	2	0	184	240	76,67
		%	27,1	33,3	35,4	4,2	0,0			
8	Dalam semua tugas yang diberikan, mengaplikasikan program yang diterapkan/digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak	F	15	19	13	1	0	192	240	80,00
		%	31,3	39,6	27,1	2,1	0,0			
	Total Indikator							**554**	**720**	**76,94**

Pada tabel 4.7 dapat dilihat persentase total skor tanggapan responden atas ketiga butir pernyataan pada indikator pengguna sebesar 76,94% dan termasuk dalam kategori baik. Artinya kemampuan pengguna sistem informasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung pada umumnya sudah baik. Selanjutnya tanggapan responden pada masing-masing butir pernyataan dapat dilihat pada umumnya pengguna sistem informasi paham tentang program aplikasi yang digunakan Direktorat Jenderal Pajak. Sebagian besar pengguna juga merasa program aplikasi yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sudah menunjang kelancaran dalam pekerjaan sehingga dalam semua tugas yang diberikan, hampir selalu mengaplikasikan program yang diterapkan/digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

4. Database

Gambaran mengenai database pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung terangkum pada tabel berikut:

Tabel 4.8
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Database

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
9	Perkembangan pengolahan data sebelum menggunakan program aplikasi ALPP	F	2	6	20	20	0	134	240	55,83
		%	4,2	12,5	41,7	41,7	0,0			
10	Perkembangan pengolahan data setelah menggunakan program aplikasi ALPP	F	0	36	12	0	0	180	240	75,00
		%	0,0	75,0	25,0	0,0	0,0			
	Total Indikator							**314**	**480**	**65,42**

Pada tabel 4.8 dapat dilihat persentase total skor tanggapan responden atas kedua butir pernyataan pada indikator database sebesar 65,42% dan termasuk dalam kategori kurang. Artinya database yang tersedia pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung masih kurang memadai. Selanjutnya tanggapan responden pada masing-masing butir pernyataan dapat dilihat paling banyak responden berpendapat perkembangan pengolahan data sebelum menggunakan program aplikasi ALPP membuat pekerjaan pemeriksa lambat. Namun perkembangan pengolahan data setelah menggunakan program aplikasi ALPP menjadikan pekerjaan sebagian besar pemeriksa menjadi lebih cepat.

5. Jaringan

Gambaran mengenai jaringan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung terangkum pada tabel berikut:

Tabel 4.9
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Jaringan

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
11	Bagaimana server yang ada di Direktorat Jenderal Pajak	F	0	17	19	3	9	140	240	58,33
		%	0,0	35,4	39,6	6,3	18,8			
12	Kondisi jaringan internet dikantor pada bagian pemeriksaan	F	0	27	5	10	6	149	240	62,08
		%	0,0	56,3	10,4	20,8	12,5			
	Total Indikator							**289**	**480**	**60,21**

Pada tabel 4.9 dapat dilihat persentase total skor tanggapan responden atas kedua butir pernyataan pada indikator jaringan sebesar 60,21`% dan termasuk dalam kategori kurang. Artinya jaringan sistem informasi yang terdapat pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung masih kurang memadai. Selanjutnya tanggapan responden pada masing-masing butir pernyataan dapat dilihat paling banyak responden merasa server yang ada di Direktorat Jenderal Pajak kadang-kadang bermasalah. Demikian juga dengan kondisi jaringan internet, masih banyak responden berpendapat jaringan internet dikantor pada bagian pemeriksaan masih dalam keadaan keadaan kurang baik.

Setelah diuraikan hasil tanggapan responden pada masing-masing indikator, selanjutnya untuk mendapatkan gambaran variabel sistem informasi secara menyeluruh, dihitung rekapitulasipersentase skor jawaban responden dari seluruh indikator yang membentuknya. Berikut gambaran

hasil rekapitulasi persentase jawaban responden atas semua indikator yang membentuk variabel sistem informasi.

Tabel 4.10
Rekapitulasi Persentase Skor Jawaban Responden Mengenai Sistem Informasi

No Pertanyaan	Skor Aktual	Skor Ideal	%Skor Aktual	Kriteria
1	189	240	78,75	Baik
2	151	240	62,92	Kurang
3	156	240	65,00	Kurang
4	188	240	78,33	Baik
5	185	240	77,08	Baik
6	178	240	74,17	Baik
7	184	240	76,67	Baik
8	192	240	80,00	Baik
9	134	240	55,83	Kurang
10	180	240	75,00	Baik
11	140	240	58,33	Kurang
12	149	240	62,08	Kurang
Total	2026	2880	70,35	Baik

Melalui tabel 4.10 dapat diketahui Rekapitulasi persentase skor jawaban responden sebesar 70,35% termasuk dalam kategori baik berada pada interval 68-84. Selanjutnya bila dilihat berdasarkan indikator tampak bahwa persentase skor tanggapan responden pada indikator hardware, software dan brainware berada pada interval 68-84 yang termasuk dalam kategori baik. Namun pada indikator data base dan jaringan masi dalam kondisi kurang baik. Artinya sistem informasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung secara keseluruhan sudah dalam kondisi baik.

4.3.2 Analisis Deskriptif Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung akan terungkap melalui jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan pada kuesioner. Pemeriksaan pajak diukur menggunakan 8 (delapan) indikator dan dioperasionalisasikan menjadi 12 butir pernyataan. Berikut tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada masing-masing indikator.

1. Mempelajari berkas Wajib Pajak

Gambaran tentang indikator mempelajari berkas Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung terangkum pada tabel berikut:

Tabel 4.11
Tanggapan Responden Pada Indikator Mempelajari berkas Wajib Pajak

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
1	Kewajiban mempelajari berkas WP/berkas data	F	29	15	4	0	0	217	240	90,42
		%	60,4	31,3	8,3	0,0	0,0			

Pada tabel 4.11 dapat dilihat persentase total skor tanggapan responden pada pernyataan yang membentuk indikator mempelajari berkas Wajib Pajak sebesar 90,42% dan termasuk dalam kategori sangat baik. Artinya pemeriksa pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung pada umumnya sangat diwajibkan mempelajari berkas Wajib Pajak /berkas data.

2. Mengidentifikasi Masalah Wajib Pajak

Gambaran tentang indikator mengindentifikasi masalah Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung terangkum pada tabel berikut:

Tabel 4.12
Tanggapan Responden Pada Indikator Mengidentifikasi Masalah Wajib Pajak

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
2	Pemeriksa perlu mengidentifikasi masalah WP	F	27	15	6	0	0	213	240	88,75
		%	56,3	31,3	12,5	0,0	0,0			

Pada tabel 4.12 dapat dilihat persentase total skor tanggapan responden pada pernyataan yang membentuk indikator mengidentifikasi masalah Wajib Pajak sebesar 88,75% dan termasuk dalam kategori sangat baik. Artinya pemeriksa pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung pada umumnya merasa sangat perlu untuk mengidentifikasi masalah Wajib Pajak.

3. Sarana dan Prasarana pemeriksaan

Gambaran tentang indikator sarana dan prasarana pemeriksaan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung terangkum pada tabel berikut:

Tabel 4.13
Tanggapan Responden Pada Indikator Sarana dan Prasarana pemeriksaan

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
3	Pemeriksa perlu memiliki Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak	F	30	14	4	0	0	218	240	90,83
		%	62,5	29,2	8,3	0,0	0,0			

Pada tabel 4.13 dapat dilihat persentase total skor tanggapan responden pada pernyataan yang membentuk indikator sarana dan prasarana pemeriksaan sebesar 90,83% dan termasuk dalam kategori sangat baik. Artinya pemeriksa pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung pada umumnya merasa sangat penting memiliki Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak.

1. Memeriksa di tempat Wajib Pajak

Gambaran tentang indikator memeriksa di tempat Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung terangkum pada tabel berikut:

Tabel 4.14
Tanggapan Responden Pada Indikator Memeriksa di tempat Wajib Pajak

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
4	Perlu dilakukan Pemeriksaan di tempat Wajib Pajak	F	22	17	9	0	0	205	240	85,42
		%	45,8	35,4	18,8	0,0	0,0			

Pada tabel 4.14 dapat dilihat persentase total skor tanggapan responden pada pernyataan yang membentuk indikator memeriksa di tempat Wajib Pajak sebesar 85,42% dan termasuk dalam kategori sangat baik. Artinya pemeriksa pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung pada umumnya merasa sangat perlu memeriksa di tempat Wajib Pajak.

2. Melakukan Pemeriksaan Buku, Catatan dan Dokumen

Gambaran mengenai pemeriksaan buku, catatan dan dokumen pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung terangkum pada tabel berikut:

Tabel 4.15
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Melakukan Pemeriksaan Buku, Catatan dan Dokumen

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
5	Pemeriksaan Buku,Catatan dan Dokumen dilakukan dalam prosedur pemeriksaan di instansi	F	23	15	9	1	0	204	240	85,00
		%	47,9	31,3	18,8	2,1	0,0			
6	Apakah dalam pelaksanaan pemeriksaan di instansi Bapak/Ibu wajib pajak menolak meminjamkan dokumen,catatan	F	0	14	31	3	0	155	240	64,58
		%	0,0	29,2	64,6	6,3	0,0			
	Total Indikator							**359**	**480**	**74,79**

Pada tabel 4.15 dapat dilihat persentase total skor tanggapan responden atas kedua pernyataan yang membentuk indikator pemeriksaan buku, catatan dan dokumen sebesar 74,79% dan termasuk dalam kategori baik. Artinya pemeriksa pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung sudah melakukan pemeriksaan buku, catatan dan dokumen dengan baik. Selanjutnya tanggapan responden pada masing-masing butir pernyataan dapat dilihat paling banyak responden sangat sering melakukan pemeriksaan Buku,Catatan dan Dokumen dalam rangka prosedur pemeriksaan di instansi. Namun dalam pelaksanaan pemeriksaan di instansi, mayoritas Wajib Pajak pernah menolak meminjamkan dokumen,catatan.

3. Melakukan Konfirmasi kepada pihak ketiga

Gambaran mengenai konfirmasi kepada pihak ketiga pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung terangkum pada tabel berikut:

Tabel 4.16
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Melakukan Konfirmasi kepada pihak ketiga

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
7	Di instansi Bapak/Ibu dilakukan pemeriksaan ulang apabila data berbeda	F	8	22	9	7	2	171	240	71,25
		%	16,7	45,8	18,8	14,6	4,2			
8	Dalam pelaksanaan pemeriksaan di instansi Bapak/Ibu meminta bantuan dari pihak ketiga	F	5	8	31	3	1	157	240	65,42
		%	10,4	16,7	64,6	6,3	2,1			
	Total Indikator							**328**	**480**	**68,33**

Pada tabel 4.16 dapat dilihat persentase total skor tanggapan responden atas kedua pernyataan yang membentuk indikator konfirmasi kepada pihak ketiga sebesar 68,33% dan termasuk dalam kategori baik. Artinya pemeriksa pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung sering melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga. Selanjutnya tanggapan responden pada masing-masing butir pernyataan dapat dilihat paling banyak responden sering melakukan pemeriksaan ulang apabila data berbeda. Namun dalam pelaksanaan pemeriksaan di instansi, mayoritas pemeriksa pernah meminta bantuan dari pihak ketiga.

4. Memberitahukan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak

Gambaran mengenai pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung terangkum pada tabel berikut:

Tabel 4.17
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Memberitahukan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Paj**ak**

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
9	Apakah di instansi Bapak/Ibu hasil pemeriksaan diberitahukan pada wajib pajak	F	22	23	2	1	0	210	240	87,50
		%	45,8	47,9	4,2	2,1	0,0			
10	Seluruh bukti dan hasil pemeriksaan selalu diberitahukan kepada WP	F	3	29	12	3	1	174	240	72,50
		%	6,3	60,4	25,0	6,3	2,1			
	Total Indikator							**384**	**480**	**80,00**

Pada tabel 4.17 dapat dilihat persentase total skor tanggapan responden atas kedua pernyataan yang membentuk indikator pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak sebesar 80,0% dan termasuk dalam kategori baik. Artinya pemeriksa pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung sering memberitahukan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak. Selanjutnya tanggapan responden pada masing-masing butir pernyataan dapat dilihat paling banyak responden sering memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak. Demikian juga dengan bukti dan hasil pemeriksaan, mayoritas pemeriksa sering memberitahukan bukti dan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak.

5. Melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan

Gambaran mengenai pembahasan akhir hasil pemeriksaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung terangkum pada tabel berikut:

Tabel 4.18
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
11	Seluruh hasil akhir pemeriksaan di instansi Bapak/Ibu diberitahukan kepada wajib pajak	F	32	13	2	1	0	220	240	91,67
		%	66,7	27,1	4,2	2,1	0,0			
12	Dalam setahun pemeriksaan yang dilakukan di instansi Bapak/Ibu berapa kali yang ditolak oleh wajib pajak	F	32	6	4	3	3	205	240	85,42
		%	66,7	12,5	8,3	6,3	6,3			
	Total Indikator							**425**	**480**	**88,54**

Pada tabel 4.18 dapat dilihat persentase total skor tanggapan responden atas kedua pernyataan yang membentuk indikator pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebesar 88,54% dan termasuk dalam kategori sangat baik. Artinya pemeriksa pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung sebagian besar selalu melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Selanjutnya tanggapan responden pada masing-masing butir pernyataan dapat dilihat mayoritas responden selalu memberitahukan seluruh hasil akhir pemeriksaan di instansi kepada wajib pajak. Demikian juga dengan jumlah pemeriksaan yang ditolak, mayoritas hasil akhir pemeriksaan tidak pernah ditolak oleh wajib pajak.

Setelah diuraikan hasil tanggapan responden pada masing-masing indikator, selanjutnya untuk mendapatkan gambaran pemeriksaan pajak secara menyeluruh, dihitung akumulasi skor tanggapan responden dari seluruh indikator yang membentuknya. Berikut gambaran hasil akumulasi tanggapan responden atas kedelapan indikator yang membentuk variabel pemeriksaan pajak.

Tabel 4.19
Rekapitulasi Persentase Skor Jawaban Responden Mengenai Pemeriksaan Pajak

No Pertanyaan	Skor Aktual	Skor Ideal	%Skor Aktual	Kriteria
1	217	240	90,42	Sangat baik
2	213	240	88,75	Sangat baik
3	218	240	90,83	Sangat baik
4	205	240	85,42	Sangat baik
5	204	240	85,00	Sangat baik
6	155	240	64,58	Kurang
7	171	240	71,25	Baik
8	157	240	65,42	Kurang
9	210	240	87,50	Sangat baik
10	174	240	72,50	Baik
11	220	240	91,67	Sangat baik
12	205	240	85,42	Sangat baik
Total	2349	2880	81,56	Baik

Pada tabel 4.19 diatas dapat dilihat bahwa hasil perhitungan persentase total skor tanggapan responden pada variabel pemeriksaan pajak sebesar 81,56 berada pada interval 68 – 84. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Bandung secara umum sudah baik. Selanjutnya bila dilihat berdasarkan indikator tampak bahwa persentase skor tanggapan responden pada indikator mempelajari berkas wajib pajak, mengidentifikasi masalah wajib pajak, sarana dan prasarana pemeriksaan, memeriksa di tempat wajib Pajak dan melakukan

pembahasan akhir hasil pemeriksaan berada pada interval 84 – 100 yang termasuk dalam kategori sangat baik. Kemudian untuk indikator melakukan pemeriksaan buku, catatan dan dokumen, melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga dan memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak sudah baik.

4.3.3 Analisis Deskriptif Kepatuhan Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung akan terungkap melalui jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan pada kuesioner. Kepatuhan pajak diukur menggunakan 2 (dua) indikator dan dioperasionalisasikan menjadi 4 butir pernyataan. Berikut tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada masing-masing indikator.

1. **Tidak pernah terkena hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan**

   Gambaran mengenai hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung terangkum pada tabel berikut:

Tabel 4.20
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Tidak pernah terkena hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
1	Di instansi Bapak/Ibu WP mengisi besarnya penghasilan dalam SPT sama dengan laporan keuangannya	F	4	31	7	5	1	176	240	73,33
		%	8,3	64,6	14,6	10,4	2,1			
2	instansi Bapak/Ibu berapa persen WP yang mengisi besarnya penghasilan dan beban pada SPT nya sama dengan laporan keuangannya	F	26	9	5	5	3	194	240	80,83
		%	54,2	18,8	10,4	10,4	6,3			
	Total Indikator							**370**	**480**	**77,08**

Pada tabel 4.20 dapat dilihat persentase total skor tanggapan responden atas kedua pernyataan yang membentuk indikator tidak pernah terkena hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan sebesar 77,08% dan termasuk dalam kategori baik. Artinya wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung sebagian besar tidak pernah terkena hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Selanjutnya tanggapan responden pada masing-masing butir pernyataan dapat dilihat wajib pajak telah mengisi besarnya penghasilan dalam SPT sangat sesuai dengan laporan keuangannya. Demikian juga dengan jumlah wajib pajak yang mengisi besarnya penghasilan, sekitar 40% wajib pajak telah mengisi besarnya penghasilan dan beban pada SPT nya sama dengan laporan keuangannya.

2. Tepat waktu dalam penyampaian SPT

Gambaran mengenai ketepatan waktu dalam penyampaian SPT di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung terangkum pada tabel berikut :

Tabel 4.21
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Tepat waktu dalam penyampaian SPT

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
3	Di instansi Bapak/Ibu berapa persen dalam setahun WP yang menyampaikan SPT nya tepat pada waktunya/ sebelum batas waktu terakhir	F	23	9	9	5	2	190	240	79,17
		%	47,9	18,8	18,8	10,4	4,2			
4	Di instansi Bapak/Ibu berapa persen dalam setahun WP yang menyampaikan SPT nya pada batas waktu terakhir	F	20	9	13	2	4	183	240	76,25
		%	41,7	18,8	27,1	4,2	8,3			
	Total Indikator							**373**	**480**	**77,71**

Pada tabel 4.21 dapat dilihat persentase total skor tanggapan responden atas kedua pernyataan yang membentuk indikator ketepatan waktu dalam penyampaian SPT sebesar 77,71% dan termasuk dalam kategori baik. Artinya wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung sebagian besar sudah tepat waktu dalam penyampaian SPT. Selanjutnya tanggapan responden pada masing-masing butir pernyataan dapat dilihat lebih dari 50% wajib telah menyampaikan SPT nya tepat pada waktunya/ sebelum batas waktu terakhir. Demikian juga dengan batas waktu terakhir menyampaikan SPT, hanya sekitar 10% wajib pajak yang menyampaikan SPT nya pada batas waktu terakhir.

Setelah diuraikan hasil tanggapan responden pada masing-masing indikator, selanjutnya untuk mendapatkan gambaran kepatuhan pajak secara menyeluruh, dihitung akumulasi skor tanggapan responden dari seluruh indikator yang membentuknya. Berikut gambaran hasil akumulasi tanggapan responden atas kedua indikator yang membentuk variabel kepatuhan pajak.

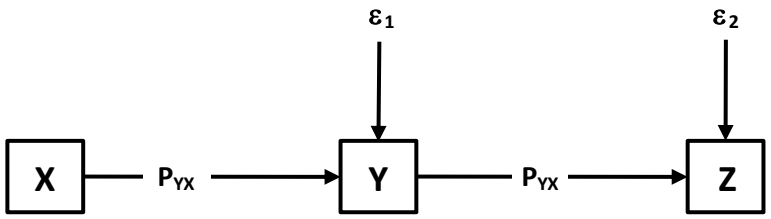
Tabel 4.22
Rekapitulasi Persentase Skor Jawaban Responden Mengenai Sistem Informasi

No Pertanyaan	Skor Aktual	Skor Ideal	%Skor Aktual	Kriteria
1	176	240	73,33	Baik
2	194	240	80,83	Baik
3	190	240	79,17	Baik
4	183	240	76,25	Baik
Total	743	960	77,40	Baik

Melalui tabel 4.22 dapat diketahui persentase skor akumulasi tanggapan responden sebesar 77,40% berada pada interval 68-84 termasuk dalam kategori baik. Artinya wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung secara keseluruhan sudah patuh. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Bandung secara umum sudah baik. Selanjutnya bila dilihat berdasarkan indikator tampak bahwa persentase skor tanggapan responden pada indikator tidak pernah terkena hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dan tepat waktu dalam penyampaian SPT sudah dalam keadaan baik.

4.4 Analisis Verifikatif

Semakin baik sistem informasi diharapkan akan membuat pemeriksaan pajak juga menjadi lebih baik sehingga kepatuhan pajak diharapkan akan semakin meningkat. Berdasarkan data yang terkumpul, pada bagian ini akan diuji pengaruh sistem informasi terhadap pemeriksaan pajak dan implikasinya terhadap kepatuhan pajak. Pengujian akan dilakukan dalam dua tahap, dimana pada tahap pertama akan diuji pengaruh sistem informasi terhadap pemeriksaan pajak, kemudian pada tahap kedua akan diuji pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pajak. Secara diagram bentuk hubungan antara ketiga variabel yang sedang diteliti tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 4.2
Diagram Jalur Paradigma Penelitian

Gambar diagram jalur seperti terlihat diatas dapat diformulasikan kedalam 2 bentuk persamaan struktural sebagai berikut.

Persamaan Jalur Sub Struktur Pertama

$$\mathbf{Y = P_{YX}X + \varepsilon_1}$$

Persamaan Jalur Sub Struktur Kedua

$$\mathbf{Z = P_{ZY}Y + \varepsilon_2}$$

Keterangan:
Z = Kepatuhan pajak
Y = Pemeriksaan pajak
X = Sistem informasi
$\mathbf{P_{YX}}$ = Koefisien jalur sistem informasi terhadap pemeriksaan pajak
$\mathbf{P_{ZY}}$ = Koefisien jalur pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pajak
ε = Pengaruh faktor lain

Karena keterbatasan skala pengukuran variabel penelitian, yaitu skala ordinal, maka sebelum menguji pengaruh sistem informasi terhadap pemeriksaan pajak dan implikasinya terhadap kepatuhan pajak terlebih dahulu data ordinal tersebut dikonversi menjadi skala interval melalui *method of succesive interval.* Dari data masing-masing variabel, diperoleh rekap data untuk perhitungan analisis jalur sebagai berikut.

Tabel 4.23
Rekap Data Variabel X, Y, dan Z Untuk Perhitungan Analisis Jalur

KPP	X	Y	Z	X^2	Y^2	Z^2	XY	YZ
1	30,364	33,268	12,185	921,972	1106,760	148,474	1010,150	405,371
2	34,537	33,795	9,587	1192,804	1142,102	91,911	1167,178	323,993
3	34,273	34,314	10,637	1174,639	1177,451	113,146	1176,044	364,998
4	30,796	36,253	11,222	948,394	1314,280	125,933	1116,447	406,831
5	38,795	37,173	13,866	1505,052	1381,832	192,266	1442,127	515,441
6	37,975	40,917	14,937	1442,101	1674,201	223,114	1553,823	611,177
7	43,939	42,316	13,883	1930,636	1790,644	192,738	1859,323	587,473
∑	**250,679**	**258,036**	**86,317**	**9115,597**	**9587,269**	**1087,581**	**9325,091**	**3215,284**

Sesuai dengan hipotesis penelitian yang diajukan, selanjutnya data akan diuji dengan menggunakan analisis jalur *(path analysis).* Analisis jalur mengkaji hubungan sebab akibat yang bersifat struktural dari variabel independen terhadap variabel dependen dengan mempertimbangkan keterkaitan antar variabel independen. Hasil komputasi analisis jalur menggunakan bantuan software SPSS 18.0 dapat dilihat pada lampiran. Untuk mengetahui tingkat kekuatan hubungan antar sesama variabel, maka nilai koefisien korelasi yang diperoleh dikonsultasikan ke tabel interpretasi koefisien korelasi berikut.

Tabel 4.24
Pedoman Pengklasifikasian Koefisien Korelasi

No	Interval Koefisien Korelasi	Tingkat Hubungan
1	0,000 – 0,199	Sangat rendah
2	0,200 – 0,399	Rendah
3	0,400 – 0,599	Sedang
4	0,600 – 0,799	Kuat
5	0,800 – 1,000	Sangat kuat

Sumber: Sugiyono, 2009; 250

Variabel bebas pada penelitian ini adalah sistem informasi (X) dan pemeriksaan pajak (Y) dan variabel dependen kepatuhan pajak(Z), Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan software SPSS.18 diperoleh koefisien korelasi antara variabel tersebut sebagai berikut.

Tabel 4.25
Korelasi Antar Variabel Penelitian

Correlations

		Z	X	Y
Pearson Correlation	Z	1.000	.623	.799
	X	.623	1.000	.827
	Y	.799	.827	1.000
Sig. (1-tailed)	Z	.	.068	.016
	X	.068	.	.011
	Y	.016	.011	.
N	Z	7	7	7
	X	7	7	7
	Y	7	7	7

Koefisien korelasi antara sistem informasi (X) dengan pemeriksaan pajak (Y) sebesar 0,827 dan masuk dalam kategori sangat kuat atau sangat erat. Arah hubungan positif antara sistem informasi dengan pemeriksaan pajak menunjukkan bahwa semakin baik sistem informasi cenderung diikuti dengan pemeriksaan pajak yang semakin baik.

Koefisien korelasi antara pemeriksaan pajak (Y) dengan kepatuhan pajak (Z) sebesar 0,799 termasuk dalam kategori kuat dengan arah positif. Artinya pemeriksaan pajak yang baik akan membuat kepatuhan pajak makin tinggi.

4.4.1 Pengaruh Sistem Informasi Terhadap Pemeriksaan Pajak

Pada sub struktur yang pertama variabel sistem informasi berperan sebagai variabel independen (eksogenus variabel) dan pemeriksaan pajak sebagai variabel dependen (endogenus variabel). Selanjutnya untuk menguji pengaruh sistem informasi terhadap pemeriksaan pajak ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a) Menghitung Koefisien Jalur

Karena variabel independen hanya satu variabel (sistem informasi), maka nilai koefisien korelasi sekaligus menjadi koefisien jalur. Koefisien korelasi antara sistem informasi (X) dengan pemeriksaan pajak (Y) menggunakan rumus sebagai berikut.

$$r_{XY} = \frac{n\sum XY - \sum X \sum Y}{\sqrt{\left[\left(n\sum X^2 - \left(\sum X\right)^2\right) \times \left(n\sum Y^2 - \left(\sum Y\right)^2\right)\right]}}$$

$$r_{XY} = \frac{7 \times (9325,091) - (250,679 \times 258,036)}{\sqrt{\left[\left(7 \times (9115,597) - (250,679)^2\right) \times \left(7 \times (9587,269) - (258,036)^2\right)\right]}}$$

$$r_{XY} = \frac{65275,636 - 64684,206}{\sqrt{\left[(63809,182 - 62839,961) \times (67110,884 - 66582,577)\right]}}$$

$$r_{XY} = \frac{591,430}{\sqrt{969,221 \times 528,307}}$$

$$r_{XY} = \frac{591,430}{715,574}$$

$$r_{XY} = 0,827$$

$$\left(P_{YX}\right) = r_{XY} = \left(0,827\right)$$

Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan software SPSS.18 diperoleh koefisien jalur sistem informasi terhadap pemeriksaan pajak sebagai berikut.

Tabel 4.26
Koefisien jalur sistem informasi terhadap pemeriksaan pajak

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	15.010	6.707		2.238	.075
	X	.610	.186	.827	3.283	.022

a. Dependent Variable: Y

Nilai *standardized coefficients* sebesar 0,827 pada tabel 4.26 merupakan nilai koefisien jalur sistem informasi terhadap pemeriksaan pajak. Koefisien jalur adalah bobot pengaruh langsung variabel sistem informasi terhadap pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung.

b) Menghitung Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi diperoleh dari mengkuadratkan nilai koefisien jalur, jadi koefisien determinasi sistem informasi terhadap pemeriksaan pajak dihitung menggunakan rumus sebagai berikut.

$$R^2_{YX} = \left(P_{YX}\right)^2 = \left(0,827\right)^2$$
$$= 0,683$$

Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan software SPSS.18 diperoleh koefisien determinasi sistem informasi terhadap pemeriksaan pajak sebagai berikut.

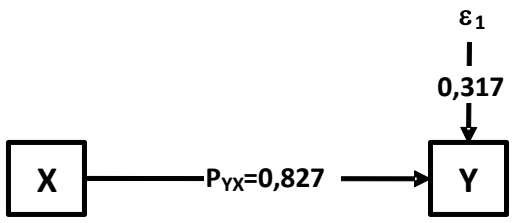
Tabel 4.27
Koefisien determinasi sistem informasi terhadap pemeriksaan pajak

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.827[a]	.683	.620	2.18703

a. Predictors: (Constant), X

Nilai koefisien determinasi dinterpretasikan sebagai besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Jadi dari hasil penelitian ini diketahui bahwa sistem informasi memberikan pengaruh sebesar 68,3% terhadap pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung, sementara sisanya 31,7% merupakan pengaruh faktor-faktor lain diluar sistem informasi yaitu penyidikan pajak dan penagihan pajak.



Gambar 4.3
Diagram Dan Koefisien Jalur Sub-Struktur Pertama

3) Pengujian Hipotesis

Untuk membuktikan apakah sistem informasi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di

wilayah Bandung, maka dilakukan pengujian dengan hipotesis statistik sebagai berikut:

Pengujian Secara Parsial

Pengaruh Sistem informasi Terhadap Pemeriksaan Pajak

Hipotesis:

Ho: $\rho_{YX} = 0$ Secara parsial Sistem informasi tidak berpengaruh terhadap pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung

Ha: $\rho_{YX} \neq 0$: Secara parsial Sistem informasi berpengaruh terhadap pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung

Keputusan penolakan/penerimaan hipotesis pada pengujian parsial karena penelitian yang dilakukan mengunakan metode sensus dilakukan tidak dengan uji t tetapi dengan melihat nilai koefisien jalur. Jika nilai koefisien jalur variabel independen tidak sama dengan nol, maka Ho ditolak dan sebaliknya apabila semua koefisien jalur sama dengan nol, maka Ho diterima.

Diperoleh nilai koefisien jalur (P_{yx}) sebesar 0,827 jadi tidak sama dengan nol. Hasil pengujian hipotesis memperlihatkan bahwa sistem informasi berpengaruh secara parsial terhadap pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Bandung.

4.4.2 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Pada sub struktur yang kedua variabel pemeriksaan pajak berperan sebagai variabel independen (eksogenus variabel) dan kepatuhan pajak sebagai variabel dependen (endogenus variabel). Selanjutnya untuk menguji pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pajak ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

a) Menghitung Koefisien Jalur

Karena variable independen hanya satu variabel (pemeriksaan pajak), maka nilai koefisien korelasi sekaligus menjadi koefisien jalur.

$$r_{YZ} = \frac{n\sum YZ - \sum Y \sum Z}{\sqrt{\left[\left(n\sum Y^2 - \left(\sum Y\right)^2\right) \times \left(n\sum Z^2 - \left(\sum Z\right)^2\right)\right]}}$$

$$r_{YZ} = \frac{7 \times (3215,284) - (258,036 \times 86,317)}{\sqrt{\left[\left(7 \times (9587,269) - (258,036)^2\right) \times \left(7 \times 1087,581 - (86,317)^2\right)\right]}}$$

$$r_{YZ} = \frac{22506,985 - 22272,893}{\sqrt{\left[(67110,884 - 66582,577) \times (7613,070 - 7450,624)\right]}}$$

$$r_{YZ} = \frac{234,091}{\sqrt{528,307 \times 162,446}}$$

$$r_{YZ} = \frac{234,091}{292,952}$$

$$r_{YZ} = 0,799$$

$$\left(\mathrm{P}_{ZY}\right) = r_{YZ} = (0,799)$$

Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan software SPSS.18 diperoleh koefisien jalur pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pajak sebagai berikut.

Tabel 4.28
Koefisien jalur pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pajak

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-4.003	5.518		-.725	.501
	Y	.443	.149	.799	2.972	.031

a. Dependent Variable: Z

Nilai *standardized coefficients* sebesar 0,799 pada tabel 4.28 merupakan nilai koefisien jalur pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pajak. Koefisien jalur adalah bobot pengaruh langsung variabel pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung, dimana semakin besar bobotnya maka pengaruhnya juga semakin besar.

b) Menghitung Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi diperoleh dari mengkuadratkan nilai koefisien jalur, jadi koefisien determinasi pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pajak dihitung menggunakan rumus sebagai berikut.

$$R^2_{ZY} = \left(P_{ZY}\right)^2 = \left(0{,}799\right)^2$$
$$= 0{,}639$$

Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan software SPSS.18 diperoleh koefisien determinasi pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pajak sebagai berikut.

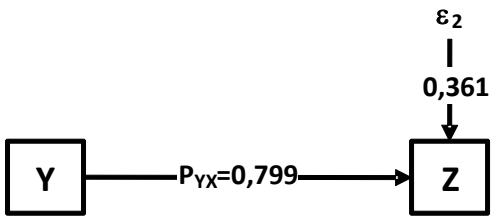
Tabel 4.29
Koefisien determinasi pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pajak

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.799[a]	.639	.566	1.29527

a. Predictors: (Constant), Y

Nilai koefisien determinasi dinterpretasikan sebagai besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Jadi dari hasil penelitian ini diketahui bahwa pemeriksaan pajak memberikan pengaruh sebesar 63,9% terhadap kepatuhan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung, sementara sisanya 36,1% merupakan pengaruh faktor-faktor lain diluar pemeriksaan pajak, faktor-faktor lain itu diantaranya adalah kondisi sistem administrasi perpajakan, pelayanan pada wajib pajak dan tarif pajak.



Gambar 4.4
Diagram Dan Koefisien Jalur Sub-Struktur Kedua

3) Pengujian Hipotesis

Untuk membuktikan apakah pemeriksaan pajak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Bandung, maka dilakukan pengujian dengan hipotesis statistik sebagai berikut:

Pengujian Secara Parsial

Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Hipotesis:

Ho: $\rho_{ZY} = 0$ Secara parsial Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung

Ha: $\rho_{ZY} \neq 0$: Secara parsial Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung

Keputusan penolakan/penerimaan hipotesis pada pengujian parsial karena penelitian yang dilakukan mengunakan metode sensus dilakukan tidak dengan uji t tetapi dengan melihat nilai koefisien jalur. Jika nilai koefisien jalur variabel independen tidak sama dengan nol, maka Ho ditolak dan sebaliknya apabila semua koefisien jalur sama dengan nol, maka Ho diterima.

Diperoleh nilai koefisien jalur (P_{ZY}) sebesar 0,799 jadi tidak sama dengan nol. Hasil pengujian hipotesis memperlihatkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Bandung.

4.4.3 Pengaruh Sistem Informasi terhadap Pemeriksaan Pajak dan implikasinya terhadap Kepatuhan Pajak



Gambar 4.5
Diagram Jalur sistem informasi terhadap pemeriksaan pajak dan implikasinya terhadap kepatuhan pajak

Pengaruh sistem informasi terhadap pemeriksaan pajak dan implikasinya terhadap kepatuhan pajak pada KPP Pratama di wilayah Bandung diperoleh dari perkalian pengaruh X terhadap Y dengan Y terhadap Z.

Diperoleh Koefisien jalur yang diperoleh (P_{YX}) sebesar 0,827 dan Koefisien jalur yang diperoleh (P_{ZY}) sebesar 0,799. Jadi dapat diperoleh pengaruh sistem informasi terhadap Kepatuhan Perpajakan dan implikasinya pada kepatuhan pajak pada KPP Pratama di wilayah Bandung adalah 0,827 ×0,799 × 100% = 66,1%. Artinya 66,1% kepatuhan pajak dipengaruhi oleh sistem informasi dan pemeriksaan pajak. Sementara 33,9 % dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar sistem informasi dan pemeriksaan pajak. Faktor-faktor lain tersebut diantaranya adalah penyidikan pajak, penagihan pajak kondisi sistem administrasi perpajakan, pelayanan pada wajib pajak dan tarif pajak.